PERANAN *JAPAN FOUNDATION* DALAM MENYEBARLUASKAN KEBUDAYAAN JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2013-2015

Oleh,
Irfan Hakim
NIM : 44311019
Skripsi ini di bawah bimbingan :
H. Budi Mulyana, S.IP.,M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung 40132 Indonesia

ABSTRACT

Intention of this research are to know and understand how far role of Japan Foundation in spreading Japanese culture at Indonesia on 2013-2015. For answer the problems, researcher was analizing goals, programs, obstacles and results obtained Japan Foundation in spreading its country.

The method used in this research is qualitative method. In collect datas, researcher was doing field studies, literature studies, online searchs and used purposive techniques for determine informans.

Results of the research shown that Japan Foundation have big roles in get national interest of Japan. Public diplomacy which used culture as a instument for create mutual understanding between people of Japan and people of Indonesia was been one of important factor to develop diplomatic relation between Japan and Indonesia, then researcher made concluded that Japan Foundation was been important thing to get Japan success in implementation public diplomacy its country at Indonesia.

Keywords : *Diplomacy*, *Culture*, *Soft Power*, *Japan Foundation*, Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauhmana peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-2015. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisis tujuan-tujuan, program kerja, kendala serta hasil yang diperoleh *Japan Fundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan negaranya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data-data peneliti melakukan studi lapangan, studi pustaka, penelusuran *online* dan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Japan Foundation* memiliki peranan yang cukup besar dalam memenuhi kepentingan nasional Jepang. Diplomasi publik yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen dalam menciptakan kesepahaman antara rakyat Jepang dan rakyat Indonesia menjadi salah satu faktor penting terhadap perkembangan hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa *Japan Foundation* menjadi bagian penting terhadap kesuksesan Jepang dalam mengimplementasikan diplomasi publik negaranya di Indonesia.

Kata Kunci : Indonesia, *Japan Foundation*, *Soft Power*, Diplomasi, Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah konsep yang sangat umum dipergunakan dalam kehidupan masyarakat internasional (Chandra di dalam Hermawan, 2007 : 89). Selain itu, kemajuan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi di dunia. Oleh karena itu, fenomena tersebut mempengaruhi perkembangan kajian dalam studi ilmu hubungan internasional yang dahulu hanya membahas tentang *high politic* berkembang menjadi *low politic* karena yang menjadi aktor dalam studi ini hanya *state actor* melainkan juga *non-state actor*. Gobaliasi juga tidak hanya mempengaruhi perkembangan actor yang dibahas dalam studi ilmu hubungan internasional tetapi juga membuat semakin luasnya isu yang dibahas di dalamnya. Salah satu isu yang dibahas dalam studi ilmu hubungan internasional dewasa ini adalah isu kebudayaan.

Kebudayaan telah banyak dijadikan oleh suatu Negara dalam menjalankan politik luar negeri negaranya di lingkungan internasional. Kebudayaan telah banyak dijadikan sebagai instrumen diplomasi yang dianggap tepat oleh beberapa Negara di dunia dalam mempererat hubungan negaranya dengan negara lain amupun untuk mempererat hubungan rakyat di suatu Negara dengan rakyat dari Negara lainnya.

Salah satu negara yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen penting dalam menjalankan politik luar negeri negaranya adalah Jepang. Kebudayaan dijadikan oleh Pemerintah Jepang sebagai instrumen untuk menciptakan pandangan baru negaranya yang dahulu dikenal masyarakat internasional sebagai negara imperialis menjadi negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan bercitra baik (Ogouro, 2009 : 8 - 9).

Dalam memenuhi kepentingan tersebut pemerintah Jepang mendirikan sebuah lembaga yang kebudayaan dengan diberi nama *Japan Foundation* untuk membantu menyukseskan proses diplomasi Jepang terhadap suatu negara yang salah satunya Indonesia. *Japan Foundation* didirikan pada tahun 1972 dengan tujuan untuk menciptakan kesepahaman antara rakyat Jepang dan rakyat dari Negara lain melalui pertukaran kebudayaan (www.jpf.go.jp/e/about/index.html diakses pada 19/12/2015).

Pendirian lembaga tersebut menjadi tanda perubahan politik luar negeri Jepang yang awalnya instrumen utamanya dengan ekonomi berubah menjadi kebudayaan. Namun karena seiring perkembangan perekonomian yang membuat Jepang semakin mendominasi pasar ekonomi di dunia terutama Asia, Eropa dan Amerika yang membentuk Jepang menjadi Negara raksasa ekonomi di dunia tanpa memiliki kekuatan politik (Irsan, 2007 : 76).

Fokus Jepang terhadap pembangunan ekonomi negaranya yang telah sangat maju membuat dominasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya menimbulkan berbagai macam kecaman

dari rakyat di negara tersebut yang memandang Jepang hanya ingin mengekspolitasi sumber kekayaan alam yang ada di negara mereka (Cipto, 2007 : 182-183).

Keadaan tersebut menciptakan sentimen anti-Jepang oleh rakyat Asia Tenggara terutama Indonesia. Rakyat di Indonesia dan beberapa Negara lainnya menganggap bahwa Jepang telah merubah agresi militer mereka menjadi agresi ekonomi. Keadaan tersebut dan sentiment ani-Jepang tersebut direalisasikan dengan aksi demontrasi, unjuk rasa dan pengerusakan beberapa produk-produk asal Jepang seperti mobil, motor dan beberapa produk-produk lainnya pada tahun 1974 peristiwa ini yang sekarang dikenal dengan peristiwa Malari/Malapetaka Januari (Tahiro, 2003 : 139-140).

Keadaan itulah yang membuat Jepang harus mengevaluasi kembali politik luar negeri negaranya. Setelah Kakuei Tanaka digantikan oleh Takeo Fukuda akhirnya Jepang merubah kebijakan luar negeri negaranya yang dahulu menitik beratkan kepada pembangunan hubungan dengan negara lain melalui diplomasi ekonomi kemudian berubah menjadi diplomasi kebudayaan. Kebijakan tersebut mulai dikasanakan pasca pidato Perdana Menteri Takeo Fukuda pada KTT ASEAN pertama di Manila Filipina pada tahun 1977 dengan konsepnya yang disebut *Fukuda Doctrine*.

Pada prinsipnya doktrin tersebut berisi tentang prinsip Jepang yang tidak akan menjalankan hubungan luar negerinya tanpa kekuatan militer. Jepang akan lebih memperkuat hubungan negaranya dengan ASEAN melalui *heart to heart understanding* dan membantu ASEAN dalam menyelesaikan masalah Indo-china (Sudo, 2002 : 36). Doctrin tersebut juga mempertegas keinginan Jepang untuk menjalin kerjasama baru antara negaranya dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial dan kebudayaan.

Sejak saat itulah Jepang mendirikan beberapa kantor *Japan Foundation* di luar negeri yang salah satunya di Indonesia pada tahun 1979. Respon positif dari rakyat Asia Tenggara terutama Indonesia terhadap rencana Jepang tersebut membuat pemerintah Jepang yang menjabat pada periode-periode berikutnya terus mempertahankan *Fukuda Doctrine* dalam menjalankan politik luar negeri negaranya baik itu pada masa Perdana menteri yang menjabat pada 1980-1983, dilanjutkan oleh Perdana menteri Nakasone pada 1983-1986 maupun pada masa Perdana menteri Noboru Takeshita pada tahun 1987-1990 (Sudo, 2002 : 37).

Konsistensi pemerintah Jepang dan peningkatan yang dilakukannya dalam membangun hubungan luar negerinya dengan diplomasi kebudayaan membuat kebudayaan Jepang semakin lama semakin berkembang terutama sejak tahun 1990-an. Kebudayaan Jepang yang semakin digemari oleh masyarakat Asia Tenggara terutama Indonesia membuat pemerintah Jepang terus meningkatkan promosi dan penyebarluasakan kebudayaan negaranya. Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Hashimoto tahun 1997 menganggap bahwa kebudayaan menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan luar negeri negaranya sehingga sudah semestinya Jepang dan ASEAN lebih memperkuat kerjasama di bidang kebudayaan

dengan lebih meningkatkan aktivitas pertukaran kebudayaan (Sudo, 2002 : 39-40).

Berberagai kebudayaan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Asia Tenggara terutama Indonesia diantaranya seperti *manga*, *anime*, *game*, *anime song/ani-song*, *Japan*-Pop/J-Pop, *fashion* khas Jepang seperti *harajuku style* dan *costume play/cosplay* bahkan hingga makanan Jepang serta berbagai macam kebudayaan lainnya. Bahkan kebudayaan-kebudayaan tersebut telah banyak diperdagangkan, dikonsumsi, dan diekspor ke berbagai Negara untuk memmenuhi permintaan masyarakat internasional terhadap produk - produk kebudayaan Jepang (http://startupbisnis.com/ japanese-station-memanjakan-komunitas-penggemar-dunia-jepang-secara-digital-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12/12/2015).

Fenomena kemajuan dan semakin berkembanganya kebudayaan Jepang di berbagai belahan Negara dunia membuat pemerintah merubah status *Japan Foundation* menjadi *independent administrative institution* pada tahun 2003. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang ke seluruh dunia yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan secara nasional dan internasional, seminar, pameran, festival seni dan kebudayaan Jepang, memfasilitasi pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia serta melakukan pertukaran intelektual dan studi Jepang (*Annual Report the Japan Foundation*, 2003 : 91).

Setelah perubahan status *Japan Foundation* pada tahun 2003. Maka program kerja *Japan Foundation* akan dipusatkan ke dalam 3 program utama sesuai dengan *article* 3 *the Japan Foundation Independent Administrative Institution Law* yang diantaranya adalah *pertama, arts and cultural exchange* dengan melakukan promosi dan pertukaran berbagai seni dan budaya Jepang ke seluruh dunia. *Kedua*, *Japanese-language education overseas* yang memusatkan pada pengembangan pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia. *Ketiga*, *Japanese studies and intellecutal exchange* yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda di seluruh dunia tentang seluruh aspek seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat dan lain-lain melalui pertukaran intelektual dan studi tentang Jepang. *Annual Report Japan Foundation*, 2003 : 91). Dari beberapa penjelasan di atas. Maka peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul Peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-2015.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini menjadi dua bagian yang di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, rumusan masalah mayor : "Bagaimana peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluskan kebudayaan Jepang di Indonesia tahun 2013-2015?"

Kedua, rumusan masalah minor pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa tujuan *Japan Foundation* menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-2015?

2. Program apa saja yang dilaksanakan oleh *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013–2015?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-2015?
4. Apa hasil dari penyebarluasan kebudayaan Jepang di Indonesia yang dilakukan oleh *Japan Foundation* pada tahun 2013-2015?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Tahun 2013-2015 dipilih karena bertepatan apda tahun 2012 Perdana Menteri Shinzo Abe terpilih sebagai pemerintah Jepang yang baru terlebih PM Abe menganggap bahwa kebudayaan akan menjadi bagian yang sangat penting dalam politik luar negeri negaranya sehingga aktivitas pertukaran kebudayaan antara Jepang dan Indonesia akan semakin ditingkatkan dengan pembuatan beberapa kerjasama baru di antara kedua Negara tersebut. Oleh karena itu, dengan rencana tersebut secara otomatis peranan *Japan Foundation* akan semakin terlihat. Sehingga tahun 2013-2015 dipilih sebagai periode yang akan diteliti diharapkan mampu memberikan data-data yang masih sangat baru dan teraktual terkait peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk lebih memahami secara mendalam tentang peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia terutama pada tahun 2013 – 2015. Terutama sejak Perdana Menteri Shinzo Abe menjabat yang merencanakan untuk terus meningkatkan pertukaran kebudayaan internasional di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sehingga dengan rencana tersebut membuat peranan *Japan Foundation* akan semakin terlihat dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itulah penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013-2015.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang pada 2013–2015. *Kedua*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang dilaksanakan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada 2013-2015. *Ketiga*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada 2013–2015. *Keempat*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penyebarluasan kebudayaan Jepang di Indonesia yang dilakukan oleh *Japan Foundation* pada 2013-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada maksud dan tujuan serta latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya

maka peneliti mengategorikan kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, berikut ini adalah kegunaan dari penelitian yang peneliti buat :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan data-data dan referensi untuk pengembangan suatu kajian ilmu terutama pada studi Ilmu Hubungan Internasional seperti pada kajian hubungan internasional di kawasan Asia Timur, kajian hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara serta kajian diplomasi dan negosiasi. Sehingga baik peneliti maupun pembaca dapat lebih lebih baik dalam memahami dan menganalisis peranan *Japan Foundation* menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia..

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Peneliti, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan ilmu, pengetahuan serta informasi mengenai peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia pada tahun 2013–2015.

Kemudian bagi lembaga akademik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan data-data/informasi dan dokumen akademik yang sangat berguna di masa depan terutama bagi seluruh akademisi khususnya bagi yang akan meneliti tentang peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia terutama bagi seluruh civitas akademik di program studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNIKOM.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan informasi, pengetahuan serta wawasan bagi siapapun yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kebudayaan Jepang dan bagi siapapun yang juga ingin memahami maupun mempelajari peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Politik Luar Negeri

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani di dalam buku mereka berjudul "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" mengemukakan bahwa :

> "secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunai internasional. suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya" (Perwita dan Yani, 2005 : 47).

Kemudian agar dapat lebih memahami konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas maka berikut ini adalah tiga konsep kebijakan luar negeri yang menjelaskan hubungan suatu negara dengan peristiwa atau situasi di luar negaranya menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani :

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster orientation*). Politik luar negeri merupakan sekumpulan orientasi yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi situasi eksternal sehingga mengharuskan dibuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai sebagai hasil dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
2. Politik luar negeri menjadi seperangkat komitmen dan rencana dalam bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*) dengan kata lain kebijakan luar negeri merupakan rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh pembuat keputusan dalam membina dan mempertahankan situasi lingkungan yang konsisten maupun sejalan dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*) yang menempatkan kebijakan luar negeri pada tingkatan yang lebih empiris dengan memperlihatkan langkah-langkah nyata para pembuat keputusan yang berhubungan dengan peristiwa serta situasi di lingkungan eksternal berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan atas komitmen dan sasaran yang lebih spesifik (Perwita dan Yani, 2005 : 53–55).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Menurut Teuku may Rudy dalam bukunya yang berjudul "Hubungan Internasional Kontemporer dan asalah-masalah Global : Isu, Konsep, Teori dan Paradigma" menjelaskan bahwa :

> "kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2003 : 116).

Maka kepentingan nasional menjadi sebuah dasar dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara karena pada dasarnya tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mencapai *national interest* negaranya dengan meliputi berbagai macam kategori atau keinginan suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, *national interest* (kepentingan nasional) dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang dikemukakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani berikut ini :

1. *Core / basic / vital interest*, kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah - daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara.
2. *Seconday interest*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang di mana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya seperti melalui jalan perundingan (Perwita dan Yani, 2005 : 52).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *national interest* dijadikan landasan oleh suatu negara untuk mengorientasikan politik luar negeri

negaranya melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan di negara mereka dalam rangka untuk menjaga keamanan, kelestarian, kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat serta bangsanya.

2.1.3 Diplomasi

Menurut rounlie yang dikutip oleh Obsatar Sinaga di dalam buku "Implemenetasi Kebijakan Luar neger" mengemukakan bahwa :

> "diplomasi merupakan sertiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil - wakilnya yang mendapatkan otorisasi" (Brounlie di dalam Sinaga, 2010 : 101).

. Kemudian yang menjadi tujuan diolomasi menurut menurut Kautilya yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi adalah sebagai berikut :

1. *Acquisition*, perolehan informasi sebagai bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau pertimbangan kebijakan.
2. *Preservation* (pemeliharaan) maksudnya diplomasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama.
3. *Augmentation* (penambahan) maksudnya diplomasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. *Proper distribution* (pembagian yang adil) maksudnya diplomasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil (Kautilya di dalam Shoelhi, 2011 : 89).

Kemudian diplomasi yang dibahas dalam penelitian ini ada dua macam yaitu diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan. Menurut Edmund Gullion yang dikutip oleh Muhammad Shoelhi mengemukakan bahwa diplomasi publik adalah :

> "diplomasi yang dilancarkan tokoh atau kelompok masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dalam rangka menimbulkan kesadaran (*awarness*) atau membentuk citra positif tentang diri atau lembaga yang menaunginya dengan menggunakan cara-cara yang menyenangkan dan dapat diterima" (Edmund di dalam Shoelhi, 2011 : 157).

Mohammad Shoelhi memberikan penjelasan bahwa diplomasi publik biasanya dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat (*Government to People*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat publik domestik atau publik asing. Selain itu diplomasi public juga dikenal dengan *second track diplomacy* yang dilakukan oleh pemerintah suatu Negara maupun lembaga yang telah memiliki otoritas atau perimtah dari pemerintah di negara tersebut untuk melakukan diplomasi dengan dilakukan secara *unofficial* (Shoelhi, 2011 : 158).

Kemudian ada juga yang disebut diplomasi kebudayaan. Menurut Kartini Sabekti berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi di dalam buku "Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional" menjelaskan bahwa :

> "kebudayaan merupakan sarana penunjang yang ampuh bagi diplomasi dan dapat menumbuhkan saling pengertian, bahkan dapat menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda. Diplomasi kebudayaan bisa dilancarkan dalam bentuk berbagai festival internasional mengenai kebudayaan, seperti festival musik angklung, kulintang dan gamelan; festival tari dari berbagai daerah; pameran benda-benda tradisional bersejarah, barang-barang antik dari emas dan perak, serta perhiasan permata intan berlian keraton; pergelaran seni rupa; pertunjukan teater dan film; serta bazar makanan

> tradisional. Festival-festival semacam itu selalu menarik minat sebagian besar khalayak massa di negara akreditasi tempat diplomat bertugas. Melalui festival itu, terjadilah interaksi aktif antarmanusia dan antarbangsa, dan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan diplomasi (Kartini di dalam Shoelhi, 2011 : 82).

Sedangkan yang menjadi tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara, apabila mungkun untuk memengaruhi pendapat umum masyarakat dan negara yang dikunjungi (Sinaga, 2010 : 105). Kemudian Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari di dalam buku mereka yang berjudul "Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang" menjelaskan bahwa dilihat dari bentuk, tujuan dan sarananya, diplomasi kebudayaan memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

1) Eksibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2) Propagada, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3) Kompetisi yang berupa olahraga, kontes kecantikan maupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya.
4) Penetrasi yang merupakan salah satu bentuk diplomasi dengan dilakukan melalui bidang perdagangan, ideologi dan militer.
5) Negosiasi yang di dalam lingkungan budaya, negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosaisi yang dilaksanakan.
6) Pertukaran ahli merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi tersebut yang cakupannya meliputi masalah kerjasama pertukaran budaya secara luas seperti kerjasama beasiswa antar bangsa sampai dengan pertukaran berbagai ahli dalam bidang tertentu (Warsito dan Kartikasari, 2007 : 21-20).

2.1.4 Kebudayaan sebagai *Soft Power*

Menurut Joseph Jr. S Nye mengemukakan bahwa soft power adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membentuk pola pikir negara lain agar cenderung mengikuti sesuatu yang diinginkan oleh negara dari pelaku *soft power* tersebut (Nye, 2004 : 5). Sedangkan di buku lain yang berjudul *soft power and public diplomacy*, Joseph S. Nye Jr mengemukakan bahwa :

> "*soft power* adalah sebuah kemampuan untuk mencapai suatu tujuan melalui daya tarik yang tidak melalui paksaan melainkan melalui daya tarik budaya yang dimiliki suatu negara, ide politik suatu negara serta dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya (Nye, 2008 : 94).

Soft power yang dimiliki oleh suatu negara pada dasarnya dapat dilihat dari tiga sumber utama yang tersedia di negara tersebut. Tiga sumber tersebut di antaranya adalah sumber budaya, nilai-nilai politis dan juga kebijakan luar negeri (Nye, 2004 : 11).

2.1.4 Konsep Peranan Nasional

Peranan juga dapat dipahami sebagai sebuah *output* kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara-negara yang terlibat di dalam

sebuah sistem maupun *regional affairs*. Hal tersebut dikemukakan oleh K.J Holsti yang dikutip oleh Teuku May Rudy di dalam bukunya yang berjudul "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" bahwa :

> "Peranan nasional merupakan *output* kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan negara yang terlibat dalam sebuah sistem atau *regional affairs*. Kita dapat mengartikan konsep peranan sebagai bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi negara mereka dan fungsi yang harus dijalankan oleh negara meraka secara geografi maupun berkaitan dengan isu yang tengah berkembang" (Rudy, 2002 : 142).

Kemudian K.J Holsti juga mengemukakan beberapa tipe yang menjelaskan tentang tingkatan tindakan suatu negara dengan diimplikasikan pada aspek peranan nasional yang menunjukan keterlibatan (*high involvement*) yang tinggi, dan biasanya merujuk pada negara dengan orientasi yang cenderung acuh tak acuh (*non-involvement*), atau negara yang cenderung sedikit melakukan tindakan politik luar negeri, konservatif, pasif dan lemah. Berikut ini adalah 16 tipe yang dikemukakan oleh K.J Holsti yang dikutip oleh Teuku May Rudy di dalam bukunya yang berjudul "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" dengan diantaranya adalah : *Bastian of the revolution, liberator*; *Regional leader*; *Regional protector*; *Active-independent*; *Liberation supporter*; *Anti-Imperalist agent*; *Defender of the faith*; *Mediator-integrator*; *Regional-subsystem collaboration*; *Developer*; *Bridge*; *Faithful ally*; *Independent*; *Example*; *Internal development*; *Other role* (K.J Holsti di dalam Rudy, 2002 : 144).

2.1.6 Institusi Nasional

Salah satu aktor yang turut membantu suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya adalah institusi nasional. Oleh karena interdepedensi antar Negara membuat setiap Negara membutuhkan actor lain dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya. Menurut Wursanto di dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Ilmu Organisasi" mendefinisikan bahwa :

> "institusi atau lembaga pemerintahan ialah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan masyarakat" (Wursanto, 2005 : 11).

Maka bukan hal yang tidak mungkin jika lembaga nasional yang didirikan oleh suatu negara mampu untuk berperan aktif dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya. Sehingga institusi nasional maupun lembaga pemerintahan nasional juga dapat menjadi aktor dalam studi ilmu hubungan internasional selama aktivitas yang dilakukannya melintasi batas-batas wilayah negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul "Administrasi dan Organisasi Internasional" yang menjelaskan bahwa :

> "ada organisasi/lembaga nasional masing-masing negara, tetapi menjalankan program internasional ke mancanegara. Contohnya lembaga-lembaga pemberi bantuan luar negeri (*foreign aid*) antara lain *Overseas Development Assistance* (ODA) Jepang, USAID (AS), AusID (Australia), CARE (Canada). Demikian pula yayasan yang

> didirikan pada masing-masing negara tetapi programnya internasional seperti *Japan Foundation*, *Ford Foundation*, *WorldHelp*, *WorldVision* dan lain sebagainya (Rudy, 2009 : 71).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga, institusi maupun organisasi nasional yang didirikan oleh suatu negara dapat turut berperan dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara dengan catatan bahwa lembaga tersebut bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan fungsi maupun bidangnya masing-masing.

2.2 Kerangka Pemikiran

Ingatan masyarakat Indonesia atas sikap Jepang selama pasa perang dunia kedua. *Image* negative ini yang coba dihilangkan oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Pada awalnya Jepang menggunakan diplomasi ekonomi untuk mempererat hubungan negaranya dengan Indonesia. Perkembangan industri membuat perekonomian Jepang secara bertahap mengalami kemajuan.

Hingga pada tahun 1970-an, Jepang telah mampu bangkit dan berubah menjadi salah satu Negara raksasa ekonomi di dunia. Dominasi ekonomi yang diperlihatkan Jepang di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kebangkitan perekonomian Jepang membuat negaranya mulai menguasai pasar ekonomi internasional dengan memasarkan berbagai macam produk industri dari negaranya. Namun keadaan tersebut ternyata membuat masyarakat Asia Tenggara termasuk dari Indonesia mulai mencurigai Jepang ingin menguasai negara mereka seperti di masa penjajahan hanya saja dahulu melakukan penjajahan dengan agresi militer namun pada tahun 1970-an, Jepang menjajah Indonesia melalui agresi ekonomi. Sehingga Jepang diangga sebagai *economic animal*. Oleh karena itu, pada tahun 1972 Jepang mendirikan *Japan Foundation* untuk membangun citra positif kepada masyarakat dunia terhadap Jepang melalui promosi kebudayaan.

Namun di Indonesia sendiri, citra buruk Jepang telah membuat kemarahan masyarakat di Indonesia serta beberapa Negara ASEAN memuncak. Masyarakat menganggap bahwa Jepang hanya ingin mengekspolitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta beberapa Negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sejak saat itu, sentimen anti-Jepang mulai berkembang hingga pada akhirnya memuncak pada tahun 1974 dengan ditandai oleh peristiwa Malari/Malapetaka Januari di mana terjadi demonstrasi besar-besaran, pengerusakan dan pembakaran produk-produk industri dari Jepang.

Peristiwa tersebut membuat pemerintah Jepang mengevaluasi kembali arah politik luar negerinya yang kemudian pada tahun 1977 ketika Perdana Menteri Takeo Fukuda menjabat perubahan kebijakan luar negeri mulai dibentuk dengan ditandai oleh dikeluarkannya *fukuda doctrine*. Saat itu, diplomasi ekonomi Jepang yang sudah diterapkan oleh pendahulunya sejak perang dunia berakhir dirubah menjadi diplomasi kebudayaan. Hal ini terlihat sejak Perdana Menteri Takeo Fukuda melakukan kesepakatan kerjasama sosial budaya dengan ASEAN sehingga hasil dari kesepakatan tersebut pada tahun 1979, pemerintah Jepang mendirikan kantor *Japan Foundation* di Indonesia.

Sejak saat itu, promosi dan pengenalan kebudayaan Jepang mulai dibuat untuk

membangun kesepahaman antara masyarakat Jepang dengan masyarakat dari luar negeri. Sejak *Japan Foundation* berdiri di Indonesia, kebudayaan Jepang mulai banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain di dunia juga kebudayaan Jepang sudah sangat berkembang. Pada tahun 1990-an, kebudayaan Jepang menjadi salah satu fenomena yang membuat perdagangan dan ekspor produk-produk kebudayaan Jepang semakin meningkat.

Popularitas kebudayaan negaranya yang semakin berkembang serta kantor-kantor *Japan Foundation* yang sudah banyak tersebar di beberapa negara di dunia. Pada tahun 2003, pemerintah Jepang memutuskan untuk merubah status *Japan Foundation* menjadi *independent administrative institution* dengan demikian program kerja *Japan Foundation* mulai dipusatkan menjagi tiga program kerja utama yang diantaranya adalah *art and culture exchange*, *Japanese-language education overseas*, dan *Japan studies and intellectual exchange*.

Terlebih pada tahun 2011 sempat terjadi bencana alam dan kebocoran nuklir di Fukushima Dai-ichi. Bencana tersebut sedikit mempengaruhi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jepang untuk mengunjungi maupun belajar di Jepang karena merasa hawatir akan terkontaminasi oleh zat berbahaya radiasi nuklir dari Fukushima. Sehingga beberapa negara di dunia sempat mengeluarkan *travel warning* bagi setiap warga negaranya yang ingin belajar maupun berkunjung ke Jepang (www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8431209/japan-earthquake-and-tsunami-list-of-impact-of-disaster.html diaskes pada 01/09/2015).

Oleh karena itu, dalam memulihkan kepercayaan masyarakat diperlukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat Indonesia yang salah satunya melalui pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh *Japan Foundation*. Hal ini dalam rangka membantu pemerintahan yang baru terpilih pada tahun 2012 dengan dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang yang baru untuk kembali memperoleh kepercayaan yang penuh dari masyarakat internasional terutama dari Indonesia. Sehingga pada tahun 2013-2015 peranan *Japan Foundation* akan semakin terlihat. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia tahun 2013-2015.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai macam fenomena yang terjadi. Metode kualitatif dianggap sesuai jika digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena dan peranan suatu lembaga dalam memenuhi kepentingan nasional negara mereka.

3.2 Informan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive* karena dianggap mampu untuk digunakan dalam mementukan narasumber yang relevan dengan judul penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara kepada narasumber yang relevan, studi pustaka, studi lapangan dan penelusuran *online* untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data terhadap data-data yang telah diperoleh selama penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data yang lebih identik dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengecek kembali data yang telah diperoleh.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh menggunakan teknik reduksi data dengan cara mereduksi beberapa data yang telah diperoleh kemudian memisahkan data yang relevan dengan yang tidak. Kemudian setelah dipisahkan maka peneliti dapat membuat rangkuman dari hasil penelitian.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan memperoleh beberapa data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan mengunjungi beberapa kantor seperti kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kantor *Japan Foundation* Jakarta, Perpustakaan *Japan Foundation* Jakarta, Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Republik Indonesia serta beberapa perpustakaan yang ada di Kota Bandung. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum *Japan Foundation*

4.1.1.1.1 Sejarah *Japan Foundation* di Indonesia

Pada awalnya *Japan Foundation* berdiri pada tahun 1972 atas respon dari padangan negatif dari masyarakat luar negeri terutama dari Eropa dan Amerika Serikat akibat dominasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang di negara mereka karena para pengusaha dari luar Jepang terutama Amerika dan Eropa merasa dicurangi dengan tindakan yang tidak baik. Namun ternyata pandangan yang lebih buruk muncul dari masyarakat di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia yang menganggap bahwa dominasi ekonomi dan pasar yang ada di negara mereka oleh Jepang merupakan bagian untuk dapat kembali menjajah negara mereka. Jepang dianggap hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia (Cipto, 2007 : 184-185).

Hingga pada tahun 1974, emosi masyarakat Asia Tenggara terutama dari Indonesia mulai memuncak yang kemudian ditunjukan dengan aksi untuk rasa dan demonstrasi serta melakukan pembakaran dan pengerusakan beberapa produk industri asal Jepang sebagai wujud dari sentimen anti-Jepang masyarakat Indonesia serta beberapa negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa ini yang sampai sekarang dikenal

dengan peristiwa Malari/Malapetaka Januari. Keadaan tersebut sempat membuat hubungan antara Indonesia dan Jepang kembali merenggang (Tahiro, 2003 : 147-148).

Hingga pada tahun 1976, Perdana Menteri Kakuei Tanaka digantikan oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda. Kemudian pada tahun 1977, PFukuda mengeluarkan sebuah doktrin yang disebut *Fukuda Doctirne* sebagai tanda awal perubahan arah politik dan kebijakan luar negeri Jepang yang akan focus membangun kerjasama dan pembangunan hubungan luar negeri negaranya melalui kerjasama kebudayaan (Sudo, 2002 : 36).

Sejak saat itu, Jepang melakukan berbagai macam cara untuk membangun citra positif negaranya di dunia. Kemudian agar dapat mempermudah proses diplomasi publik negaranya pada tahun 1979, Pemerintah Jepang mendirikan Kantor *Japan Foundation* di Indonesia dan setiap tahunnya pemerintah Jepang terus meningkatkan intensitas promosi dan penyebarluasan kebudayaan Jepang di Indonesia.

4.1.1.1.2 Perkembangan Hubungan Jepang dan Indonesia serta perkembangan kebudayaan Jepang Pasca *Japan Foundation* Berdiri di Indonesia

Hubungan Jepang Indonesia mulai kembali terbangun dan mengalami kemajuan sejak *Japan Foundation* berdiri pada tahun 1979. Pertukaran kebudayaan dan penyebarluasan kebudayaan oleh lembaga ini membuat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap budaya Jepang semakin lebih bertambah sehingga sedikit demi sedikit citra buruk tentang Jepang semakin menghilang di mata masyarakat Indonesia karena pada dasarnya *Japan Foundation* didirikan di Indonesia dengan tujuan untuk membangun kesepahaman antara masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia (http://www.jpf.go.jp/e/about/outline/about_01.html diakses pada 16/02/2016).

Fukuda Doctrine yang dianggap berhasil untuk dijadikan strategi nasional mereka untuk memperbaiki citra mereka melalui diplomasi kebudayaan. Kebijakan tersebut pada akhirnya terus dipertahankan oleh pemerintahan-pemerintahan pada periode berikutnya. Hingga sampai pada masa Perdana Menteri Noboru Takeshita yang menjabat pada tahun 1986-1989 merasa penting untuk mmeningkatkan proses diplomasi kebudayaan tersebut dengan tujuan untuk terus menjaga hubungan negaranya dengan Indonesia.

Oleh karena itu, pada pertemuan KTT ASEAN yang ketiga di Manila Filipina mengungkapkan pada pidatonya yang berjudul "*Japan and ASEAN a new partnership toward peace and prosperity*" yang bertujuan untuk mengembalikan kebijakan luar negeri Jepang yang menekankan pada kerjasama dan pertukaran kebudayaan. Hal ini dikarenakan pada dua periode sebelumnya yakni pada masa Zenko Suzuki (1980-1983) dan Nakasone (1983-1986) lebih menekankan kepada diplomasi ekonomi sehingga muncul kehawatiran oleh Takeshita bahwa peristiwa seperti Malari akan kembali terjadi. Maka ia mencoba untuk mengembalikan arah kebijakan luar negeri Jepang sama seperti pada masa Perdana Menteri Takeo Fukuda (Sukmara dan Widarahesty, 2011 : 294).

Prinsip-prinsip dasar hubungan luar negeri tersebut terus dipertahankan oleh pemerintahan yang berikutnya. Hingga kebudayaan Jepang pun

semakin dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia seperti pada masa Perdana. Hingga pada tahun 1990-2000-an kebudayaan Jepang yang telah sangat digemari oleh masyarakat Indonesia membuat tingkat ekspor, perdagangan dan minat masyarakat terus meningkat sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian Jepang. Kemudian membuat Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang menjabat pada tahun 2001-2006 mengeluarkan *Koizumi Doctrine* pada tahun 2002 yang disampaikan melalui pidatonya yang berjudul "*Japan and the ASEAN in the Eastasia – A Sincere and Open Partnership*" sejak saat itu, hubungan dan kerjasama kebudayaan antara Jepang dan Indonesia melalui ASEAN terus mengalami kemajuan. Melihat perkembangan kebudayaan tersebut di Indonesia serta beragai macam negara di dunia. Maka pemerintah Jepang memutuskan untuk merubah status *Japan Foundation* menjadi *independent administrative institutition* pada tahun 2003 dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada lembaga tersebut dalam mengelola berbagai macam kegiatan serta menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber keuangan (NIDS Publication Report, 2003 : 211).

Hasilnya terlihat dengan semakin banyaknya festival kebudayaan baik kebudayaan tradisional maupun kebudayaan modern yang terlaksana di Indonesia baik itu yang bersekala nasional maupun berskala internasional. Beberapa kegiatan tersebut seperti Jak-Japan Matsuri, *Little Tokyo Blok M Ennichisai* yang hampir dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan lainnya seperti AFAID dan berbagai macam kegiatan lainnya.

4.1.1.1.3 Perubahan Status dan Struktur *Japan Foundation*

Di awal pendiriannya *Japan Foundation* merupakan sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan pertukaran kebudayaan dengan negara-negara lain sebagai salah satu cara dalam memperbaiki hubungan Jepang dan negara-negara lain di dunia akibat berbagai macam pandangan negatif berbagai negara terhadapnya. Takeo Fukuda yang pada tahun Januari 1972 menjadi Menteri Luar Negeri mengumumkan pada sidang Parlemen (DIET) Jepang untuk membentuk sebuah lembaga eksekutif kebudayaan yang disebut dengan *Japan Foundation* untuk menjadi bagian dari diplomasi publik Jepang di seluruh negara. Pada Oktober 1972 Jepang menjadi institusi publik khusus yang berada di bawah pengawasan khusus Kementerian Luar negeri Jepang (Annual Report, 2003 : 91).

Seiring perkembangan kebudayaan Jepang di seluruh dunia dan semakin banyaknya kantor *Japan Foundation* yang ada di luar negeri akhirnya Pemerintah Jepang memutuskan untuk merubah status *Japan Foundation* menjadi *independent administrative institution* pada tahun 2003 dengan harapan dapat lebih leluasa dalam mengelola kegiatannya dengan tanpa secara penuh tergantung dengan Kementerian Luar Negeri Jepang. Maka setelah mengalami perubahan tersebut *Japan Foundation* secara struktur tidak lagi berada di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang namun berada langsung di bawah parlemen yang mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada parlemen bukan lagi di bawah Kementerian Luar Negeri (Annual Report, 2003 : 91).

Sumber : https://www.jpf.go.jp/e/about/outline/about_01.html diakses pada 16/02/2016

Logo *Japan Foundation*

Sejak perubahan tersebut dilakukan maka secara otomatis secara pengelolaan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan program-programnya. *Japan Foundation* tidak lagi hanya berasal/bergantung dari satu sumber (dana pemerintah Jepang). Melainkan juga bersumber dari beberapa kerjasama dan sumbangan atau bantuan dari pihak swasta maupun pihak negeri. kemudian setelah perubahan tersebut diresmikan pada tahun 2003, *Japan Foundation* dipimpin oleh presiden direktur yang memiliki tiga wakil presiden direktur yang mengatur seluruh kantor *Japan Foundation* yang tersebar di seluruh dunia (Sumber : dikelola dari *Annual Report Japan Foundation* tahun 2003 hal. 92, website Japan Foundation https://www.jpf.go.jp/e/world/ diakses pada 31/01/2016 dan hasil wawancara dengan Humas Japan Foundation Jakarta pada 14/01/2016).

Hingga saat ini, Kantor *Japan Foundation* seluruhnya berjumlah 26 kantor yang tersebar di beberapa negara di dunia yang diantaranya 4 kantor berada di Jepang dengan rincian satu sebagai kantor pusat/utama *Japan Foundation*, kantor *Japan Foundation* di Kyoto sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kebudayaan Jepang serta di Urawan dan Kansai sebagai kantor yang dijadikan sebagai pusat dan pengembangan bahasa Jepang. Kemudian sisanya 4 kantor berada di kawasan Amerika, 9 kantor berada di Asia dan Pasifik, 8 kantor berada di Eropa serta Timur Tengah dan Afrika (https://www.jpf.go.jp/e/world/ diakses pada 31/01/2016).

4.1.1.1.4 Tujuan Pendirian *Japan Foundation* di Indonesia

Pada tahun 1979, *Japan Foundation* yang mulai didirikan di Indonesia adalah sebagai bagian dari respon pemerintah Jepang untuk memperbaiki citra negaranya pasca perisitwa Malari. Sebelum berdirinya *Japan Foundation* di Indonesia. Diawali dengan dikeluarkannya prinsip dasar hubungan luar negeri Jepang terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dikemukakan pada KTT ASEAN yang pertama di Manila Filipina. Doktrin Fukuda yang dibuat oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda pada tahun 1977 menjadi salah satu bagian penting perkembangan pendirian *Japan Foundation* dalam rangka membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Asia Tenggara terutama Indonesia melalui pertukaran kebudayaan antara Jepang dan Indonesia (Sukmara dan Widarahesty, 2011 : 296-257).

Maka dari itu, diawal pendirian institusi tersebut di Indonesia bertujuan untuk membangun dan memperbaiki hubungan kedua negara dengan membangun kesepahaman antara masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia. Setelah melewati beberapa fase dan perkembangan sejak pendirian *Japan Foundation*. Maka setelah perubahan status *Japan Foundation* pada tahun 2003 menjadi *independent administrative institution*. Hasil wawancara dengan pihak *Japan Foundation*

mengemukakan bahwa secara umum tujuan *Japan Foundation* baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya memiliki tujuan yang sama. Berikut ini adalah tujuan *Japan Foundation* didirikan di Indonesia :

Pertama, *Japan Foundation* memiliki tujuan untuk memperkenalkan serta mempromosikan seni dan kebudayaan Jepang ke seluruh dunia melalui berbagai macam kegiatan pertukaran. Sehingga diharapkan dapat saling mengenal kebudayaan satu sama lain. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, *Japan Foundation* membuat berbagai macam kegiatan seperti *workshop* seni dan kebudayaan, festival kebudayaan, kolaborasi kebudayaan, seminar kebudayaan, pemutaran film, perlombaan bahkan hingga pertunjukan kolaborasi seni dan kebudayaan antara kebudayaan Jepang dengan kebudayaan negara lain.

Kedua, *Japan Foundation* memiliki tujuan untuk memperkenalkan, memberikan dan meningkatkan pendidikan bahasa Jepang di luar negeri terutama negara-negara yang memiliki kantor *Japan Foundation* seperti Indonesia. sehingga dengan meningkatkan pendidikan bahasa tersebut masyarakat internasional dapat lebih memahami segala hal tentang Jepang.

Ketiga, tujuan *Japan Foundation* adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di suatu negara termasuk Indonesia terutama bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun kalangan pemuda lainnya melalui kegiatan pertukaran intelektual dan pengembangan studi Jepang.

Keempat, pada dasarnya pendirian *Japan Foundation* di suatu negara termasuk di Indonesia bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk mempelajari tentang seni dan kebudayaan Jepang.

4.1.1.2 Gambaran Umum Tentang Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Selain itu, Jepang adalah negara yang dikelilingi oleh laut. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Tiongkok, kemudian Laut Okhotsk di sebelah utara, serta Samudera Pasifik di sebelah timur dan selatan. Secara geologis Jepang berada di antara 4 lempengan besar bumi seperti Eurasia, Amerika Utara, Filipina dan Pasifik sehingga dengan posisi lempengan tersebut membuat Jepang sering kali mengalami gempa bumi (*jishin*) dan potensi tsunami pun sangat besar terjadi di negara ini (Haryanti, 2013 : 1).

Wilayah kepulauan Jepang terbentang membentuk busur pada arah Barat Laut Samudra Psifik di tepi Timur Benua Eurasia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil denga luas sekitar 378.99 km2 membentang dari selatan ke utara sepanjang 2.500 km dan terletak pada sekitar 20 º - 46 º Lintang Utara. Jepang terdiri dari 5 pulau utama seperti Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu dan Okinawa. Sedangkan untuk Honshu terbagi ke dalam lima daerah yaitu Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, dan Chugoku. Sekitar ¾ daratan Jepang terdiri dari beberapa daerah pegunungan dan perbukitan. Oleh karena itu, lahan datar yang seharusnya digunakan lahan dan pengembangan kota di negara ini sangat terbatas (http://www.jasso.or.id/pengenalan.php diakses pada 17/02/2016).

Iklim di Jepang pada umumnya lembut dengan pergantian musim sebanyak 4 kali karena hampir seluruh wilayah Jepang berada di zona

utara yang beriklim sedang sehingga memiliki perubahan dan batasan musim yang jelas. 4 musim tersebut diantaranya adalah musim semi (*haru*), musim gugur (*aki*), musim dingin (*fuyu*) dan musim panas (*natsu*). Secara umum musim semi biasanya akan berlangsung sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei, musim panas berlangsung sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus, musim gugur akan berlangsung sekitar bulan September sampai dengan bulan November, sedangkan musim dingin akan berlangsung sekitar bulan Desember hingga bulan Februari. Namun terdapat beberapa wilayah di Jepang memiliki perubahan iklim yang tidak merata karena kepulauan Jepang memiliki struktur daratan yang rumit dan memanjang dari selatan ke utara. Contohnya pada kalender nasional Jepang, musim dingin akan berlangsung dari Desember sampai dengan Januari. Namun hal ini akan berbeda dengan wilayah utara Jepang yang mengalami musim dingin berlangsung dari bulan November hingga Maret (Haryanti, 2013 : 7).

Jepang memiliki sebutan oleh dunia sebagai negeri matahari terbit yang dapat dilihat dari bentuk bendera nasional mereka (*hinomaru*). Sedangkan lagu kebangsaan Jepang disebut dengan *Kimigayo* (http://www.id.emb-japan.go.jp /expljp_12.html diakses pada 31/01/2016). Jepang adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional dengan memisahkan kekuasaan antara Kaisar dengan Pemerintahan. Kaisar hanya menjadi simbol negara dan pemersatu rakyat serta hanya bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik. Sedangkan kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri dan anggota-anggota terpilih parlemen Jepang (DIET) yang terbagi atas dua kamar yaitu Majelis Tinggi/*sangi in* dan Majelis Rendah/*shūgi in* dengan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (Haryanti, 2013 : 105).

Kemudian penduduk Jepang mayoritas beragama Shinto dan Budha sedangkan sebagian kecil lainnya ada beragama kristen dan Islam. seiring perkembangannya penduduk Jepang mulai banyak yang memeluk agama-agama baru atau yang disebut dengan *Shinshūkyō* dengan mengandung banyak unsur-unsur ajaran dari Shinto, Budha dan takhayul lokal. Beberapa contoh agama baru yang berkembang di Jepang adalah seperti *Sokka Gakkai*, *Aum Shinrikyō, Gedatsu-kai, Kiriyama Mikkyo, Kofuku no Kagaku, Konkokyo, Ōmoto, Seicho No Le, Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, Sekai Kyūsei Kyō, Shinreikyo*, *Sukyo Mahikari*, *Tenrikyo* dan lain-lain (Haryanti, 2013 : 163).

4.1.1.2.1 Kebudayaan Jepang

Kebudayaan yang selama ini telah berkembang di Jepang terbentuk karena telah banyak menyerap berbagai gagasan dari negara-negara lain termasuk teknologi, adat-istiadat maupun bentuk-bentuk kebudayaan lainnya. Jepang telah mengembangkan berbagai macam kebudayaan yang dimilikinya sambil mengintegrasikan pengaruh serta masukan dari luar. Contohnya adalah gaya hidup orang dewasa Jepang yang berkembang saat itu merupakan hasil dari perpaduan budaya tradisional di bawah pengaruh Asia dan budaya modern Barat. Seiring perkembangannya kebudayaan Jepang dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern

atau yang lazim disebut dengan kebudayaan *Pop-Culture Japan* (http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_09.html diakses pada 19/12/2015).

4.1.1.2.1.1 Budaya Tradisional Jepang

Budaya tradisional di Jepang mencakup berbagai macam aspek seperti musik, pakaian, seni pertunjukan, makanan, olahraga upacara-upacara, ritual maupun perayaan-perayaan (*Matsuri*). Dari sekian banyak budaya yang dimiliki oleh Jepang peneliti akan memaparkan beberapa budaya yang sudah sangat dikenal oleh mayoritas masyarakat internasional secara singkat. Sehingga dapat dengan mudah dipahami ketika dibaca. Berikut ini adalah beberapa macam budaya tradisional yang ada di Jepang :

Pertama, Sado/*cha no yu* (upaca minum teh tradisional Jepang) merupakan etika atau ritual tradisional Jepang dalam menyajikan teh bagi para tamu (Soyama, 2004 : 204).

Kedua, kebudayan dari aspek pakaian. Pakaian tradisional Jepang dikenal dengan kimono tapi kimono juga memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan acara/upacara maupun untuk acara siapa kimono itu dipakai. Beberapa jenis kimono tersebut diantaranya seperti *furisode, homongi, tomesode, kurmomonstuki, uro no kimono, uchihake* dan *mofuku*. Sedangkan aksesoris yang digunakan pada saat memakai kimono adalah *obi, geta/zori* dan *tabi* (Haryanti, 2013 : 78-84).

Ketiga, berbentuk seni pertunjukan tradisional. Seni pertunjukan yang ada di Jepang diantaranya adalah Noh, *bunraku*, *kabuki*, *kyogen, yose* dan lain-lain (Haryanti, 2013 : 130-137).

Keempat, kado atau yang lebih dikenal dengan ikebana. Ikebana merupakan seni merangkai bunga khas Jepang. Perbedaan seni merangkai Bungan Jepang dan Barat adalah Barat lebih dekoratif sedangkan ikebana dari Jepang lebih mementingkan untuk menciptakan harmoni dalam bentuk linear, ritme dan warna yang tidak hanya mementingkan aspek keindahan bunga saja melainkan juga mementingkan pengaturan menurut garis linear (http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_09.html diakses pada 19/12/2015).

Kelima, musik tradisional Jepang, atau dalam bahasa Jepang disebut *hogaku*. Beberapa contoh musik tradisional Jepang diantaranya adalah *gagaku*, *biwagaku*, *skyoku*, *shakuhachi*, *shamishenongaku*, dan *minyo*.

Keenam, permainan tradisional Jepang salah satu yang dikenal oleh masyarakat luas adalah shogi. Shogi merupakan permainan sejenis catur. Namun berbeda dengan catur pada umumnya.

Ketujuh, kebudayaan tradisional yang berbentuk festival atau hari perayaan tradisional masyarakat Jepang. Contohnya adalah *hanabi*/festival kembang api yang dilakukan di sungai Sumida Tokyo pada bulan Juli, kemudian *obon matsuri* pada bulan Agustus, *setsubun*/upacara melempar kedelai pada bulan Februari dan beberapa contoh perayaan tradisional lainnya.

4.1.1.2.1.2 Budaya Populer Jepang

Kemudian yang menjadi kebudayaan Jepang semakin dikenal adalah karena Jepang memiliki kebudayaan modern/popular yang sudah menjadi ciri khas bagi negaranya atau tidak dapat

disamakan dengan kebudayaan dari negara lain. Beberapa contoh kebudayaan popular Jepang adalah *anime song/ani-song*, *Japan-pop* dan beberapa musik khas Jepang lainnya. Contoh lainnya adalah *manga*, *anime*, dan *cosplay/costume play*.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Tujuan Penyebarluasan Kebudayaan oleh *Jepang Foundation*

Globalisasi yang membuat rasa individualisme dan interdepedensi yang semakin besar. Sehingga setiap negara tidak mampu menutup diri dari dunia luar termasuk Jepang yang harus memenuhi kepentingan negaranya demi kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya.sehingga berbagai macam cara mulai dilakukan untuk memenuhi kepentingan tersebut yang salah satunya adalah melalui pertukaran kebudayaan (Perwita dan Yani, 2005 : 3-4).

Salah satu lembaga yang turut membantu untuk memenuhi berbagai macam kepentingan Jepang adalah *Japan Foundation*. Lembaga ini secara hukum didirikan untuk melakukan pertekaran kebudayaan dengan tujuan untuk membangun/menciptakan kesepahaman antara rakyat Jepang dengan rakyat dari negara lainnya termasuk Indonesia.

Ketika kesepahaman tersebut telah terbangun maka kepentingan yang dimiliki Jepang akan lebih mudah untuk dipenuhi. Diplomasi publik yang menggunakan intrumen kebudayaan atau dapat dikatakan juga sebagai diplomasi kebudayaan diharapkan mampu menjaga hubungan Jepang dengan Indonesia. Diplomasi ini tidak hanya dilakukan antar pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia tetapi juga dilakukan terhadap masyarakat Indonesia oleh pemerintah Jepang melalui *Japan Foundation*. Dengan pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut diharapkan mampu membangun citra postif Jepang terhadap masyarakat Indonesia sehingga mampu menjaga hubungan diantara keduanya (Benny di dalam Shoelhi, 2011 : 158).

Terutama setelah bencana alam pada tahun 2011 dan kebocoran reaktor nuklir di Fukushima sempat membuat perekonomian Jepang mengalami penurunan yang cukup besar, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat internasional termasuk dari Indonesia terkait keamanan nasional di Jepang bagi para wisatawan dan para pelajar yang ingin belajar di negara tersebut menurun bahkan hingga tidak diterimanya produk-prdouk dari Jepang karena adanya kehawatiran sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya dari reactor nuklir. Oleh karena itu, Perdana Menteri Shinzo Abe yang terpilih pada tahun 2012 memiliki tugas untuk memulihkan kembali keadaan Jepang.

Kemudian dari hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari berabgai macam aktivitas seperti wawancara, studi pustaka, penelusuran *online* dan lain-lain maka didapatkan bahwa *Japan Foundation* secara spesifik dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia bertujuan untuk *pertama*, melakukan pertukaran seni dan kebudayaan dengan melakukan promosi seni dan kebudayaan, pembuatan *workshop* kebudayaan, kolaborasi seni dan kebudayaan serta berbagai macam aktivitas lainnya. *Kedua*, *Japan Foundation* bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bahasa Jepang di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah masyarakat Indonesia untuk mempelajari berbagai macam hal yang ada di Jepang baik itu kebudayaan, politik, teknologi dan lain-lain karena tidak semua masyarakat Jepang dapat berbahasa Inggris sehingga peningkatan bahasa Jepang di luar negeri termasuk Indonesia dianggap sangat penting. *Ketiga*, bertujuan untuk melakukan pertukaran intelekutal dan pengembangan studi Jepang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan pemahaman kepada para masyarakat Indonesia terutama pada pemuda dari luar negeri agar dapat memahami Jepang diberbagai macam aspek baik social-budaya, politik, keamanan, teknologi, idnustri dan lain-lain sebagainya (dikelola dari hasil wawancara dengan senior *officer cultural section* dan Humas *Japan Foundation* Jakarta yang dilakukan pada 14/01/2016).

Berbagai macam tujuan tersebut dicapai dengan memanfaatkan *soft power* yang dimiliki oleh Jepang yaitu kebudayaan baik budaya tradisional maupun budaya modern/popular. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Joseph Jr. S. Nye bahwa *soft power* sangat erat kaitannya dengan kekuatan kebudayaan dalam rangka menarik minat maupun simpat masyarakat terlebih kebudayaan leluhur telah menjadi bagian dari hidup rakyat Jepang baik di perusahaan maupun di pemerintahan. Oleh karena itu, tidak heran jika nilai-nilai politik dan pola hubungan luar negeri Jepang sangat merefleksikan kebudayaan negaranya (Nye, 2004 : 34-35).

4.2.2 Program *Japan Foundation* di Indonesia tahun 2013-2015

Hampir seluruh kantor *Japan Foundation* yang tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia memiliki program yang sama/mirip karena pada dasarnya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh *Japan Foundation* harus berdasarkan pada tiga program utamanya yang telah dijelaskan di dalam *the Japan Foundation independent administrative institution law* tahun 2003 yang diantaranya adalah *art and cultural exchange*, *Japanese-language education overseas* serta *Japan studies and intellectual exchange* (the Japan Foundation Annual Report, 2003 : 91).

Namun seluruh program tersebut direalisasikan dengan disesuaikan pada keadaan negara di mana kantor *Japan Foundation* berada sehingga esensi dari dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Sehingga *Japan Foundation* sebagai intitusi nasional yang dibentuk pemerintah Jepang dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Jepang dengan demikian tujuan-tujuan yang dimiliki Jepang pun dapat tercapai karena ini merupakan konsekuensi *Japan Foundation* sebagai intitusi nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasionalnya (Wursanto, 2005 : 11).

Dari hasil penelitian dan hasil penelitian, studi pustaka, wawancara dan penelusuran *online* maka diperoleh beberapa informasi tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh *Japan Foundation* selama tahun 2013-2015. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan yng dilaksanakan oleh *Japan Foundation*.

Pertama, art and cultural exchange beberapa contoh kegiatannya adalah seperti pameran seni kaligrafi Jepang, pemutaran film dan diskusi dengan beberapa narasumber yang kompeten, pameran seni dari Jepang, *workshop* berbagai macam seni dari Jepang seperti Kurume, memakai kimono, perlombaan menyanyi lagu-lagu Jepang dan lain-lain sebagainya.

Kedua, Japanese language education overseas. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh *Japan Foundation* dalam merealisasikan program. Kegiatan tersebut seperti membuka kursus bahasa Jepang yang diklasifikasikan pada golongan umur dan tingkat kemahiran masyarakat Indonesia dalam berbahasa Jepang, ujian JLPT (*Japanese Language Proficiency Test*) berbagai macam tingkatan, lomba pidato bahasa Jepang dan beragai macam kegiatan lainnya.

Ketiga, Japan studies and intellectual exchange. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh *Japan Foundation* dalam merealisasikan program tersebut adalah program JENESYS/*Japan-Eastasia Network of Exchange for students and Youths*, *Nihongo Partners*, *the* HANDs!, *Youth Competition for Disaster Education* dan berbagai macam kegiatan lainnya (dikelola dari hasil wawancara dengan humas *Japan Foundation* Jakarta dan Penelusuran online melalui *website*, media sosial *Japan Foundation*).

4.2.3 Kendala *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia

Kebudayaan yang merupakan sebuah pandangan yang dapat dipelajari, dibagi atau dipertukarkan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya. Selain itu, kebudayaan juga menjadi sebuah dasar kehidupan, derajat kepentingan yang harus diterima oleh setiap orang (Iris Varner dan Linda Beamer di dalam Liliweri, 2007 : 7). Proses menyebarluaskan kebudayaan oleh *Japan Foundation* merupakan salah satu dari bentuk *real* diplomasi kebudayaan yang sudah dibentuk oleh pemerintah Jepang di dalam kebijakan luar negerinya. Kebudayaan dipandang sebagai sebuah aspek yang sangat penting bagi negaranya dalam memanfaatkan *soft power* yang mereka miliki untuk mempengaruhi seseorang agar mau menerima tujuan menarik minat masyarakat Indonesia (Nye, 2008 : 94).

Selama melakukan tugasnya untuk melakukan pertukaran kebudayaan sehingga kebudayaan Jepang dapat lebih tersebarluaskan dan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia tidak terdapat kendala yang mengganggu kegiatan tersebut. Pihak *Japan Foundation* menjelaskan ketika proses wawancara dilakukan menyatakan bahwa kebudayaan merupakan aspek yang paling sedikit friksinya sehingga dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia tidak mendapatkan kendala yang menganggu kegiatannya.

4.2.4 Hasil Penyebarluasakan Kebudayaan Jepang oleh *Japan Foundation*

Dari hasil penelitian hasil yang diperoleh peneliti dalam menganalisis peranan *Japan Foundation* dalam menyebarluaskan kebudayaan Jepang di Indonesia. Dalam menganalisis peranan institusi tersebut peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh K.J Holsti dengan tipe-tipe peranan yang telah dijelaskan pada

tunjauan pustaka. Peneliti sendiri menggolongkan *Japan Foundation* ke dalam tipe *independent*/bebas dan *internal development*. *Independent* maksudnya adalah Jepang sebagai negara yang tidak memiliki kekuatan secara militer. Sehingga memanfaatkan *soft powernya* untuk memenuhi berbagai macam kepentingannya. *Japan Foundation* bertindak sebagai institusi yang telah memiliki otoritas dari pemerintah untuk membantu negaranya dalam memenuhi kepentingan negaranya karena hal inilah yang pada dasarnya diinginkan oleh hampir setiap pemerintah negara termasuk Jepang (K.J Holsti di dalam Rudy, 2002 : 144).

Sedangkan tipe *internal development* menjelaskan bahwa *Japan Foundation* hanya bertindak dan melaksanakan tugas serta fungsinya hanya untuk membangun negaranya sendiri tanpa harus ikut ke dalam sistem internasional. Sehingga lembaga ini dapat bergerak lebih leluasa tidak seperti negara yang memang sudah masuk ke dalam sistem internasional sehingga dalam memenuhi kepentingan negaranya harus disesuaikan dengan hukum internasional yang telah disepakatinya (K.J Holsti di dalam Rudy, 2002 : 144).

Hasil dari peranan itu, menunjukan bahwa penyebarluasan kebudayaan Jepang di Indonesia membuat negaranya menjadi lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan hampir semua tidak mempermasalahkan berbagai macam peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. hal ini telrihat dari hasil survey yang dilakukan oleh ipsos. Dari beberapa data yang didapatkan hampir semua masyarakat Indonesia menganggap bahwa Jepang adalah negara yang sangat ramah. Sehingga hubungan antara Indonesia dan Jepang sangat penting untuk tetap dipertahankan.

Bagi masyarakat Indonesia sebesar 65% menganggap bahwa Jepang adalah negara yang sangat ramah dan 30% menganggap bahwa cukup ramah. Sedangkan yang menganggap bahwa Jepang tidak ramah hanya sekitar 3% saja. Selain itu, Sekitar 73% masyarakat Indonesia menganggap bahwa Jepang adalah negara yang sangat penting untuk dijadikan sebagai mitra kerjasama sehingga hubungan diplomatik antara keduanya harus tetap terjaga. Sedangkan yang menganggap cukup penting sekitar 26% dan menganggap tidak penting sekitar 1% (dikelola dari *Minister of Foreign Affairs of Japan*. 2014. *ASEAN Study* : *Public diplomacy, Opinion Poll on Japan*. Hongkong : ipsos hal. 44).

Selain itu, ketertarikan masyarakat juga menurut hasil penelitian dan data-data yang diperoleh memperlihatkan bahwa penyebarluasan kebudayaan yang dilakukan pemerintah maupun *Japan Foundation* menjadi salah satu faktor penting terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan Jepang. Oleh karena itu, *Japan Foundation* memiliki peranan penting dalam pembangunan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Maka seiring perkembangan dan kemajuan hubungan yang terbangun di antara keduanya dapat dikatakan bahwa *Japan Foundation* telah berhasil dalam memulihkan citra negaranya di mata masyarakat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Japan Foundation merupakan salah satu institusi yang turut membantu Jepang dalam melaksanakan diplomasi publik terhadap masyarakat Indonesia dengan menggunakan

instrumen kebudayaan. *Japan Foundation* memiliki tiga tujuan dalam menyebarluaskan kebudayaan negaranya di Indonesia yaitu untuk membangun kesepahaman antara rakyat Jepang dengan rakyat Indonesia serta rakyat dari berbagai negara lainnya.

Selain itu, secara spesifik setelah perubahan status pada tahun 2003. *Japan Foundation* memiliki tujuan untuk melakukan pertukaran kebudayaan dan seni di luar negeri, mengembangkan pendidikan bahasa Jepang di luar negeri, serta pengembangan studi Jepang serta melakukan pertukaran intelektual.

Japan Foundation memiliki tiga program utama dalam melakasanakan tugasnya diantaranya adalah *art and cultural exchange, Japanese language education overseas* serta *Japan studies and intellectual exchange*. Hasil penyebarluasan menunjukan bahwa *Japan Foundation* telah berhasil membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Jepang melalui pertukaran kebudayaan serta berhasil juga dalam membangun citra positif negaranya di mata masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan *Internasional di Asia Tenggara : Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Haryanti, Pitri. 2013. *All About Japan : Panduang lengkap & Informatif Tentang Jepang untuk Belajar, Bekerja & Berwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Hermawan, Yulius P dkk. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Irsan, Abdul. 2005. *Jepang : Politik Domestik, Global dan Regional*. Makasar : Hasanuddin University Press

_____. 2007. *Budaya dan Perilaku Politik jepang di Asia*. Jakarta Selatan : Grafindo

Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta LKiS Pelangi Aksara

Nye Jr, Joseph S. 2004. *Soft Power : The Means of Success in World Politics*. New York : Public Affairs.

_____. 2008. *Public Diplomacy and Soft Power*. New York : The *Annals of The American Academy of Political and Social Sicence*

Ogoura. Kazuo. 2009. *Japan's Cultural Diplomacy*. Jepang : The Japan Foundation

Perwita, Anak Banyu Agung dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Rudy, T May. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung : Refika Aditama.

_____. 2009. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung : Refika Aditama

Shoelhi, Muhammad. 2011. *Diplomasi : Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media

Sinaga, Obsatar. 2010. *Implementasi Kebijakan Luar Negeri*. Bandung : Lepsindo

Soyama, Mikiya. 2004. *Japan : Mini Encyclopedia of Japan*. Kamakura City : Shogakukan Square Inc

Sudo, Sueo. 2002. *The International Relations of Japan and Southeast Asia ; Forging A New Regionalism*. London : Routledge

Tahiro. 2003. *Sepak Terjang Jepang di Indonesia*. Jakarta : Studio Kreativa

Warsito, Tulus dan Kartikasari, Wahyuni. 2007. *Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang studi kasus Indonesia*. Yogyakarta : Ombak

Wursanto, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Offset

DOKUMEN DAN JURNAL

Japan Foundation. *Annual Report the Japan Foundation 2003*. Sumber : http://www/jpf.go.jp/e/about/result/ar/2003/pdf/ar2003.pdf diakses pada tanggal 08/12/2015

NIDS Publication Report. 2003. *East Asia Strategic Review 2003*. The National Institute for Defense Studies Japan ISBN 4-7890-1138-0. Tokyo : the Japan Times Ltd

Sukmara, Rina dan Yusy Widarahesty. 2011. *Perkembangan Diplomasi Luar Negeri Jepang di ASEAN Pasca Perang Dunia II : Studi Tentang Sejarah Diplomasi Jepang dari 1970-1997*. Prosiding Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora tahun 2011 dari Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia.

PENELUSURAN ONLINE :

Ipsos Hongkong. *About ipsos*, sumber : http://ipsos.co.id/our-services diakses pada 02/03/2016

Japan Foundation Global Office. *About the Japan Foundation*, sumber : https://www.jpf.go.jp/e/about/outline/about_01.html diakses pada 16/02/2016

_____. *About Us*, sumber : http://www.jpf.go.jp/e/about/index.html diakses pada 16/02/2016

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan, sumber : http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_12.html diakses pada 31/01/2016

_____. *Kebudayaan*, sumber : http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_09.html diakses pada 19/12/2015

Startupbisnis.com. *Japanese Station Memanjakan Komunitas Penggemar Dunia Jepang Secara Digital di Indonesia*. Sumber : http://startupbisnis.com /japanese-station-memanjakan-komunitas-penggemar-dunia-jepang-secara-digital-di-indonesia/ diakses pada tanggal 12/12/2015

The Telegraph. Japan *Earthquake and Tsunami : list of impact of disaster*. Sumber: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/8431209/japan-earthquake-and-tsunami-list-of-impact-of-disaster.html diakses pada 01/09/2015